

Penarikan Sumbangan Berpotensi Korupsi

● Doorprize untuk Borobudur International 10K

SEMARANG - Pemprov Jateng dinilai membebani satuan kerja perangkat daerah (SKPD), biro, dan direktur RSUD dengan memberikan surat permintaan sumbangan untuk *doorprize* guna mendukung penyelenggaraan Borobudur International 10K (10 Kilometer) di Magelang pada Minggu (17/11).

Koordinator Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng Oly Viana Agustine meminta SKPD tidak memberikan sumbangan itu. Sebab, jika ikut menyumbang, justru bisa memicu korupsi.

"Biasanya pembahasan anggaran SKPD dilakukan setahun sebelum-

nya. Sumbangan untuk *doorprize* ini kan di luar penganggaran. Kalau kemudian dianggarkan, maka itu memunculkan potensi korupsi. Apalagi, alokasi anggaran akan sulit diambilkan dari pos mana," kata Oly, Jumat (8/11).

Ia menegaskan, SKPD tidak boleh berpartisipasi selama alokasi

sumbangan itu tidak ada dalam pos anggaran.

"Pak Ganjar (gubernur Jateng) pernah menyatakan ada sponsor dari bank BUMN. Ya, sumbangan semestinya dialokasikan dari situ (sponsor)," tandasnya. KP2KKN akan memonitor sumbangan untuk *doorprize* tersebut hingga sebelum pelaksanaan lomba lari maraton itu.

Oly juga menyoroti beredarnya surat permohonan sumbangan dengan nomor 978.3/017901 yang ditandatangani Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Jateng Sri Puryono sejak 17 Oktober 2013. Ia tak yakin gubernur tidak mengetahui surat itu, terlebih Plt Sekda sudah memberikan tembusan kepadanya.

"Saat ini (kemarin-Red) sudah

tanggal 8 November, sedangkan surat edaran permohonan sumbangan tertanggal 17 Oktober. Lalu, ke mana saja Pak Gubernur, masa belum sempat membaca surat yang seharusnya sudah ada di mejanya."

Ombudsman Memonitor

Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jateng Ahmad Zaid juga menyatakan akan memonitor surat permohonan sumbangan tersebut.

"Selama ada dugaan mal-administrasi, ini akan menjadi domain Ombudsman untuk menindaklanjuti. Karena ada surat resmi, jika ada temuan pelanggaran malah bisa diangkat ke BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)," tandasnya.

Sebelumnya, Gubernur Ganjar Pranowo mengaku tidak mengetahui surat tersebut. Namun, ia menyatakan membutuhkan uang Rp 2 miliar. Itu antara lain akan dipenuhi dari sponsor, yakni bank BUMN yang sudah mengonfirmasi kesediaannya. Dalam surat edaran itu tertulis total hadiah lomba lari Rp 1,197 miliar. "Saya malah belum tahu itu, surat permohonan apa. Saya belum baca suratnya, nanti saya cek," kata Ganjar, Kamis (7/11).

Menurut Ganjar, sudah ada bank BUMN yang sepakat membantu, tapi belum diketahui jumlahnya. Jika gagal mendapat bantuan, akan diupayakan meminta dukungan sponsor ke Bank Jateng.

Adapun Sri Puryono membenarkan surat edaran tersebut. Menurutnya, itu merupakan bentuk imbauan kepada SKPD untuk meringankan beban panitia. Surat tersebut membuat para pimpinan SKPD resah. Sebab, mereka kesulitan mencarikan pos anggaran untuk mengalokasikan dana sumbangan itu. (J17, H68-59)

Surat Bermasalah Itu

- **Perihal** : Permohonan Doorprize Borobudur International 10K
- **Nomor Surat**: 978.3/017901
- **Tertanggal**: 17 Oktober 2013
- **Tanda tangan**: Plt Sekda Jateng Sri Puryono
- **Contact Person**: Kuncoro DW (Dinpora Jateng)

Borobudur International 10K

| | |
|-----------------------|---|
| Pelaksanaan | Minggu, 17 November 2013 |
| Target peserta | 16.000 orang |
| Undangan | 20 atlet internasional 30 atlet nasional |
| Total hadiah | Rp 1,197 miliar |

Sumber : Pemprov Jateng, (J17-59)

